



PERAN PEMERINTAH DUSUN TERHADAP PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO

Miranti¹⁾, Dedi Epriadi²⁾

Universitas Muara Bungo, Muara Bungo, Indonesia

Miranti.ilpol04@gmail.com¹⁾

Epriadidedi@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan pemerintah Dusun dalam pemeliharaan fasilitas umum, kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan fasilitas umum di Dusun Tanjung Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua fasilitas umum yang ada di Dusun Tanjung dan yang menjadi sampel adalah fasilitas umum di Desa Tanjung Agung yang pengelolaannya dan pemeliharannya diserahkan kepada pemerintah dusun Tanjung Agung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah dusun dalam pemeliharaan fasilitas umum meliputi perencanaan, menetapkan peraturan, melakukan koordinasi, memberi motivasi, dan berperan menjaga keamanan fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum adanya pencatatan (administrasi) yang baik atas jumlah dan kondisi fasilitas umum yang ada, keterbatasan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dan pusat sehingga menyebabkan keterbatasan sumber-sumber pendanaan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dusun dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain berusaha mengajak dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar lebih peduli dalam perawatan fasilitas umum yang ada, membuat perencanaan pembangunan desa yang disusun melibatkan masyarakat melalui musrenbang tingkat dusun, juga mengajak masyarakat ikut aktif dalam kegiatan perawatan fasilitas umum melalui gotong royong dan dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Dusun, Pelayanan Umum.

Abstract

This research aims to find out the role of the hamlet government in maintaining public facilities, what obstacles they face, and the efforts made to maintain public facilities in Tanjung Agung Hamlet. The research method used in this research is a qualitative method with qualitative descriptive data analysis techniques. The population in this study were all public facilities in Tanjung Hamlet and the samples were public facilities in Tanjung Agung Village whose management and maintenance were handed over to the Tanjung Agung Hamlet government. Based on the research results, it is known that the role of the hamlet government in maintaining public facilities includes planning, establishing regulations, coordinating, providing motivation, and playing a role in maintaining the security of public facilities in Tanjung Agung hamlet. The problems faced include the lack of proper recording (administration) of the number and condition of existing public facilities, limited authority given by regional and central governments, resulting in limited funding sources, as well as a lack of public awareness and participation. Efforts made by the hamlet government to overcome existing problems include trying to invite and increase participation from the community so that they care more about



maintaining existing public facilities, making village development plans that are prepared involving the community through village-level musrenbang, and also inviting the community to actively participate in activities. maintenance of public facilities through mutual cooperation and in the form of non-binding donations.

Key words: Role, Hamlet Government, Public Services.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan ke arah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pandangan baru tentang paradigma pembangunan tersebut menitik beratkan pada strategi pembangunan dari bawah ke atas dengan didasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk wilayah itu.

Strategi pembangunan ini harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi tinggi, untuk itu diperlukan tenaga-tenaga pemerintahan dan birokrasi berketerampilan tinggi dan siap untuk menggerakkan mesin pembangunan secara profesional, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah. Karena semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Meskipun masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti kurangnya ketersediaan fasilitas umum yang memadai yang berimbas pada terganggunya kegiatan sektor ekonomi masyarakat desa, yang akhirnya ikut mempengaruhi masalah kemiskinan dan pengangguran di desa.

Pergeseran spirit pemerintahan dan pembangunan yang menuju demokrasi dan desentralisasi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan di daerah terutama pedesaan, agar desa dapat menjadi tempat penghidupan yang layak bagi warganya dan mendorong warga desa mampu mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Di Kabupaten Bungo sendiri berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2007 tentang perubahan penyebutan daerah hukum yang paling bawah disebut Dusun. Sementara Kepala Desa disebut dengan Rio. Sementara istilah dusun sebagai bagian dari desa disebut kampung. Untuk selanjutnya istilah ini yang digunakan dalam penulisan ini.

Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing, maka pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di pedesaan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap desa adalah dengan adanya pembangunan fasilitas umum/ fasilitas sosial yang memadai dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya.

Sasaran pembangunan fasilitas umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih ditekankan pada kemandirian dan tersedianya infrastruktur penunjang perekonomian di wilayah kecamatan dan pedesaan. Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dengan prinsip keadilan yang merata. Hal ini berarti, pemerintah tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang lemah yang selalu bergantung pada pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki potensi, sehingga perlu dibangkitkan kesadaran, motivasi, mendorong serta mengembangkan potensi sumber daya yang mereka miliki. Berdasarkan pengamatan penulis banyak ditemukan fasilitas umum yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah di pedesaan yang dalam perkembangannya kurang terawat, bahkan ada yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pemeliharaan fasilitas umum di dusun Tanjung Agung sebagian dilaksanakan sendiri oleh perangkat dinas instansi yang berkaitan atau membidangi peruntukan fasilitas tersebut dan sebagian lagi dikelola oleh dusun. Fasilitas umum yang dikelola oleh dinas instansi antara lain seperti puskesmas dan puskesmas pembantu ditangani oleh dinas kesehatan, prasarana jalan diserahkan pemeliharannya pada dinas pekerjaan umum kabupaten, sekolah dikelola pemeliharannya oleh dinas pendidikan, dan madrasah oleh kementerian agama. Sementara yang pemeliharannya ditangani oleh dusun antara lain jalan setapak, Jalan Lingkungan, Jembatan Gantung, Jalan Pertanian, Pasar



Lelang, Tempat Pemandian (Jamban), Masjid, Musholla, tempat pemakaman umum, dan pasar. Bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemerintah Dusun Tanjung Agung antara lain melalui pembuatan Peraturan Dusun tentang tata cara pemanfaatan fasilitas umum yang ada.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Mengambil lokasi pada Dusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo dengan jumlah sampel sebanyak 15 Orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dusun Dalam Pemeliharaan Fasilitas Umum di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Peran pemerintah Dusun Tanjung Agung dalam pemeliharaan fasilitas umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perencanaan
Pemerintah dusun merencanakan arah pembangunan dusun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan peraturan dusun, dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Dusun (RKPDusun) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi rencana pembangunan dan kegiatan dusun.
2. Pemerintah dusun
Pemerintah Dusun berperan menetapkan peraturan tentang pengelolaan fasilitas umum di dusun, baik aturan mengenai retribusi maupun penggunaan dan perawatannya.
3. Koordinasi
Pemerintah dusun berperan sebagai koordinator dalam upaya pengumpulan dana masyarakat dan atau pihak ketiga dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas umum, seperti melakukan gotong royong atau kerjasama dengan dusun lain.
4. Motivasi
Pemerintah dusun berperan sebagai pemberi motivasi, memberikan informasi dan arahan agar masyarakat turut berperan serta dalam menjaga lingkungannya dan dalam pemeliharaan fasilitas umum di dusun Tanjung Agung.
5. Pendanaan
Pemerintah dusun berupaya mengumpulkan dan mengalokasikan dana milik dusun yang ada untuk dapat digunakan untuk kegiatan perawatan dan perbaikan fasilitas umum. Sumber dana berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), sumbangan dari pihak ketiga, dan dari pendapatan asli desa yang persetujuan penggunaannya disetujui oleh masyarakat melalui BPD.
6. Keamanan.
Pemerintah dusun berperan menjaga keamanan dan keberadaan fasilitas umum yang telah dibangun di dusun Tanjung Agung.

Pemeliharaan fasilitas umum di Dusun Tanjung Agung sebagian dilaksanakan sendiri oleh perangkat dinas instansi yang berkaitan atau membidangi peruntukan fasilitas tersebut dan sebagian lagi dikelola oleh dusun. Ada beberapa fasilitas umum yang bukan kewenangan kita mengurusnya, seperti sekolah diurus oleh dinas pendidikan, pesantren diurus oleh yayasan sendiri, puskesmas tanggung jawab dari orang-orang dinas kesehatan. Fasilitas umum yang dikelola oleh dinas instansi antara lain seperti puskesmas dan puskesmas pembantu ditangani oleh dinas kesehatan, prasarana jalan diserahkan pemeliharaannya pada dinas pekerjaan umum kabupaten, sekolah dikelola pemeliharaannya oleh dinas pendidikan, dan madrasah oleh kementerian agama.

Terdapat juga fasilitas umum yang pemeliharaannya dilakukan secara swasta baik secara individu maupun lembaga kemasyarakatan, antara lain pesantren, PAUD, dan TK. Sementara yang pemeliharaannya ditangani oleh dusun antara lain jalan setapak, tempat pemakaman umum, pasar rakyat dan pasar lelang.

Bentuk pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dusun Tanjung Agung terhadap fasilitas umum antara lain:

1. Membuat peraturan tentang operasional pasar/pekan, meliputi pengaturan lokasi pedagang, lokasi parkir, jam buka dan tutup pasar.
2. Menarik retribusi para pedagang pasar dan mengelola kebersihan pasar,

3. Mengadakan gotong royong warga untuk membersihkan dan memperbaiki got dan jalan setapak, gotong royong membersihkan kompleks pemakaman, gotong royong menjaga kebersihan mushola dan masjid.
4. Memelihara lampu penerangan jalan menggunakan dana desa dan sumbangan warga.
5. Mengkoordinir penggalangan dana untuk perbaikan masjid dan mushola.
6. Gotong royong dan pengumpulan dana untuk pembuatan dan pembersihan lapangan bola kaki dan lapangan volley milik desa, serta mengkoordinir pemanfaatan lapangan tersebut oleh pemuda, karang taruna dan warga.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun Dalam Pemeliharaan Fasilitas Umum di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Dalam rangka melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas umum yang ada di dusun, pemerintah dusun dibatasi oleh kewenangan dusun yang dizinkan oleh undang-undang dan faktor pembiayaan atau keuangan. 1). Administrasi. Kendala administrasi diungkapkan oleh Ketua BPD dan Rio dusun Tanjung Agung, yaitu belum adanya inventarisir fasilitas umum secara terpadu yang berisi data kondisi fisik dan rencana penggunaan fasilitas yang ada di dusun Tanjung Agung beserta perkiraan biayanya. Sehingga selama ini perawatan dan pemeliharaan fasilitas umum masih bersifat sporadik, yaitu berdasarkan suatu kebutuhan saat tertentu. 2). Pendanaan. Faktor pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di dusun, termasuk di dalamnya dalam melakukan pemeliharaan fasilitas sosial dan mengatur rumah tangganya sendiri dusun membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah rencana untuk memindahkan pasar ke tempat yang lebih luas dan memadai belum dapat terlaksana karena terbentur biaya, padahal lokasi pasar saat ini dirasakan sangat sempit dan tidak mampu lagi menampung pedagang dan pembeli setiap penyelenggaraannya setiap malam Senin.

Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangan dusun, maka dusun menjadi belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal. Antara lain dusun tidak memiliki kewenangan menarik pajak/ retribusi melainkan harus diserahkan ke pemerintah kabupaten, yang kedua aparat (perangkat dusun) bukan pegawai negeri dan tidak digaji oleh Negara layaknya sebagai pegawai negeri, sehingga sangat mengandalkan dari dana ADD dan bantuan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun Dalam Pemeliharaan Fasilitas Umum di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, pemerintah dusun telah dan akan mengambil beberapa upaya antara lain :

1) Inventarisir Data Fasilitas Umum.

Pemerintah dusun Tanjung Agung sedang mencoba menginventarisir kembali fasilitas umum dan juga potensi yang ada di dusun Tanjung Agung. Untuk selanjutnya dibuatkan suatu perencanaan bersama BPD dan masyarakat berupa rencana kegiatan penggunaan dan perawatan fasilitas umum yang ada. Salah satunya pengelolaan pasar yang akan diinventarisir kembali mengenai jumlah pedagang, penataan lokasi berdagang dan lokasi parkir sehingga diharapkan dapat mengurangi keluhan warga dan pengguna jalan akibat kemacetan dan kesemerawutan yang ditimbulkan di setiap penyelenggaraan pasar di Minggu malam. Langkah-langkah yang sedang dilakukan adalah dengan membuat suatu formulir isian yang dibagikan ke setiap ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mengisikan daftar fasilitas umum yang ada di wilayahnya. Selanjutnya dikumpulkan di kantor dusun dan akan diverifikasi oleh Rio dan perangkatnya, untuk kemudian dimusyawarahkan bersama BPD dan tokoh lembaga kemasyarakatan agar dapat dibuatkan rencana kegiatan dan perawatannya.

2) Musrenbang Dusun.

Sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, di tingkat dusun diadakan Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dusun. Perencanaan pembangunan dusun disusun secara partisipatif (melibatkan pihak terkait) oleh pemerintah dusun sesuai dengan kewenangannya, pihak terkait dalam hal ini adalah BPD, lembaga kemasyarakatan di dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari berbagai usulan masyarakat akan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan dan kepentingannya untuk kemudian dibawa dan diusulkan ke musyawarah tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan), dan selanjutnya lagi akan dibahas dalam musrenbang tingkat kabupaten untuk akhirnya mendapat

persetujuan dari DPRD Kabupaten. Memang tidak semua usulan atau kebutuhan dari masyarakat dusun hasil musrenbang dusun dapat direalisasikan atau disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

3) Partisipasi Masyarakat.

Untuk melakukan suatu kegiatan perawatan fasilitas umum tentunya membutuhkan dana dan sumber daya tenaga. Sementara selama ini dana untuk perawatan fasilitas umum sangat minim di anggaran belanja dusun. Untuk itu diperlukan suatu pemikiran kreatif dari perangkat dusun untuk mendapatkan dana di luar sumber keuangan dusun. Sumber keuangan dusun adalah semua hak dan kewajiban dusun yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik dusun berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa yang diizinkan oleh undang-undang terdiri atas :

- a. Pendapatan asli dusun, meliputi hasil usaha dusun, hasil kekayaan dusun, contoh di dusun Tanjung Agung adalah hasil retribusi pasar, hasil retribusi pasar lelang, dan hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli dusun yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten
- d. Bantuan dari pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Contoh bantuan dari Pemerintah Pusat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dari pemerintah provinsi adalah program Samisake (Satu Miliar Satu Kecamatan) yang diterima desa dalam bentuk pembangunan, renovasi maupun pemeliharaan. Contoh bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Keterbatasan sumber keuangan yang dimiliki oleh dusun mengharuskan pemerintah dusun secara proaktif mengusahakan sumber-sumber dana dan sumber daya untuk keperluan pemeliharaan fasilitas umum di dusun Tanjung Agung agar keberadaan dan fungsi fasilitas-fasilitas umum tetap terawat dan terjaga. Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dusun Tanjung Agung antara lain mengajak masyarakat melaksanakan gotong royong dalam kegiatan yang dapat dilakukan dengan padat karya, seperti pembuatan lapangan sepakbola dan volley, membersihkan dan merenovasi masjid, membersihkan saluran air dan lain-lain.

Pemerintah dusun juga mencoba mencari sumber pendanaan melalui bantuan pihak ketiga yaitu dari perusahaan-perusahaan dan donatur dari pengusaha dan atau pejabat-pejabat yang berasal dari dusun Tanjung Agung dan memfasilitasi pengumpulan sumbangan dari masyarakat yang semuanya bersifat sukarela dan tidak mengikat. Yang lebih penting lagi adalah perangkat dusun menjadi contoh teladan dalam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam turut menjaga keberlangsungan fasilitas umum yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintahan dusun dalam pemeliharaan fasilitas umum di Dusun Tanjung Agung mencakup: perencanaan, menetapkan peraturan, melakukan koordinasi, memberi motivasi, dan berperan menjaga keamanan fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dusun dalam melakukan perannya merawat fasilitas umum yang ada antara lain belum adanya pencatatan yang baik atas jumlah dan kondisi fasilitas umum yang ada sehingga belum ada perencanaan yang rinci untuk pemeliharannya, juga adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dan pusat sehingga menyebabkan keterbatasan sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan perawatan fasilitas umum.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah dusun berupaya meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar lebih peduli dalam perawatan fasilitas umum yang ada. Dimulai dengan musyawarah dalam merencanakan pembangunan dusun untuk 1 tahun ke depan dengan mengajak tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Juga mengajak masyarakat ikut aktif dalam kegiatan perawatan fasilitas umum melalui gotong royong dan dalam bentuk sumbangan-sumbangan.

Adanya pencatatan dan inventarisasi fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung sehingga dapat dikelola dan dipelihara dengan lebih baik. Melakukan pelimpahan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah dusun disertai sumber pendanaan yang memadai agar pemerintah dusun dapat meningkatkan perawatan fasilitas sosial yang ada di



dusun dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat terutama dalam keikutsertaan memanfaatkan dan menjaga fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung. Dan yang lebih penting lagi adalah perangkat dusun menjadi contoh teladan dalam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam turut menjaga keberlangsungan fasilitas umum yang ada. Membuat suatu perencanaan yang terpadu dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung.

DAFTAR RUJUKAN

- Mubyarto dan Kartodirdjo, 1988. Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Ndraha. Taliziduhu. 1985. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP.
- Nugroho dan Rochmin Dahuri, Peran Pemerintah dalam Pembangunan, Perbanas, Jakarta. 2008.
- Prayitno. Hadit. Pembangunan ekonomi pedesaan, Yogyakarta : liberty Yogyakarta. 1985
- Soekamto, Sarjono. Peran Penting Pemerintah dalam Pembangunan, Alfabeta, Bandung. 1984
- Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Wasistiono, sadu. Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007
- Winarno Surrachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, 1995, Hal 30.